

REFORMASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN PERGURUAN TINGGI

SUKARMAN PURBA

Abstrak

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberi dampak pada berbagai perubahan secara cepat dan sangat mendasar di segala aspek kehidupan manusia. Untuk mengatasi dampak tersebut perlu dilakukan Reformasi Pendidikan guna meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi. Pentingnya Reformasi pendidikan dilakukan untuk melahirkan perubahan sistem institusi pendidikan tersebut. Reformasi yang dilakukan dalam visi dan misi pendidikan tinggi, pembenahan kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek (*student-centered learning*). Di samping itu, perlu dikembangkan penekanan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) secara harmonis serta pengetahuan *Soft skill* dan *Success skill* secara terintegrasi pada materi pelajaran; sistem manajemen perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan manajemen mutu berkelanjutan agar mampu mengantisipasi perubahan, dan tenaga pendidik/Staf pengajar yang memiliki kepemimpinan yang baik dan jiwa kewirausahaan.

Kata Kunci: Reformasi Pendidikan, Proses Pembelajaran, Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Staf Pengajar, Mutu Lulusan.

I. Pendahuluan

Pendidikan Tinggi tidak saja dipandang mampu menentukan kemajuan dan masa depan bangsa melalui peningkatan kinerja ekonomi nasional, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial melalui akses ke perguruan tinggi. Namun, salah satu masalah pendidikan tinggi yang dihadapi dewasa ini adalah merosotnya mutu pendidikan. Menurut Tilaar yang dikutip Purba (2002) menyatakan Pendidikan Tinggi perlu mengadakan pembenahan manajemen, karena manajemen yang

sentralistik telah mengakibatkan merosotnya mutu pendidikan. Sedangkan Efendi (2001) menyatakan pendidikan tinggi kita saat ini sedang menghadapi tiga tantangan berat, yakni (a) peningkatan mutu, (b) akses yang merata dan adil bagi semua golongan masyarakat, serta (c) efisiensi internal yang masih rendah. Biaya yang diperlukan untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut amat mahal.

Sejalan dengan itu, maka Perguruan tinggi perlu melakukan reformasi dengan melakukan proses evaluasi diri. Hal ini sangat diperlukan agar Pendidikan Tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas lulusan. Pada saat ini banyak Perguruan Tinggi yang memiliki gedung yang baik, akan tetapi jumlah mahasiswa yang sedikit dan bahkan ada Perguruan Tinggi yang tidak memiliki gedung sendiri, hanya menumpang namun memiliki mahasiswa yang banyak, sehingga perlu dipertanyakan kualitas lulusan dari Perguruan Tinggi tersebut. Proses evaluasi diri harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel secara terus-menerus, sehingga perguruan tinggi dapat menilai kapasitasnya sendiri, dalam penyelenggaraan proses pendidikan sesuai dengan *output* dan *outcomes* yang dijanjikan kepada *stakeholders*. Jika hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang efisien dan efektif, maka upaya *merger* atau penggabungan dengan perguruan tinggi lain perlu mendapat pertimbangan yang serius. Suatu perguruan tinggi yang selalu bercirikan suatu satuan organisasi profesional, maka hasil dan dampak yang tersalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas.

Reformasi pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, terutama dalam mengantisipasi kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat dan akibat perubahan pada tiap segmen kehidupan.

Menurut Wirosuharjo (1998) bahwa kebutuhan untuk berubah sangat penting khususnya pada kualitas Pendidikan Tinggi yang dipengaruhi oleh:

1. Meningkatnya ras ketidakpuasan atas kinerja sistem pendidikan yang ada.
2. Perubahan yang dramatis dari institusi pendidikan tinggi di dunia
3. Perkembangan pangsa pasar dan kompetensi pada pendidikan tinggi yang diyakini bahwa pendidikan tinggi merupakan kunci pekerjaan dan perkembangan karir seseorang
4. Persaingan antar pendidikan tinggi akan memicu timbulnya perkembangan pendidikan tinggi jarak jauh.

Sebagai tuntutan peningkatan mutu pendidikan akan melahirkan perubahan sistem institusi pendidikan tinggi, yang menghasilkan sinergi bersifat global, baik melalui kerja sama dengan universitas di luar negeri maupun kerja sama antar daerah. Selain itu, dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu diharapkan mampu berkompetisi dan tetap eksis dalam persaingan, bahkan dapat lebih maju. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, pendidikan tinggi harus mampu melihat kebutuhan mahasiswa, memberi pelayanan yang bermutu serta meningkatkan wawasan mahasiswa yang bersifat nasional maupun wawasan internasional. Dengan demikian, output Perguruan Tinggi diharapkan memiliki kemampuan daya kerja yang dapat diandalkan di masa mendatang sehingga diharapkan mampu bersaing di era pasar bebas dan globalisasi.

Reformasi Pendidikan Tinggi

Dalam melakukan suatu perubahan diperlukan kesiapan dan perencanaan yang baik agar perubahan tersebut dapat diterima dan dilakukan secara bersama-sama oleh civitas akademika. Ada beberapa hal

yang harus diperhatikan dalam mereformasi pendidikan tinggi di Indonesia di antaranya visi dan misi pendidikan tinggi, pembenahan kurikulum, perbaikan prasarana dan sarana, sistem manajemen perguruan tinggi, dan tenaga pendidik/Staf pengajar.

a. Visi dan misi

Pendidikan Tinggi (PT) merupakan salah satu organisasi, yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama. Dengan demikian, suatu organisasi tentunya memiliki visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan. Drucker menekankan bahwa tanpa pemahaman mengenai tujuan, kita benar-benar akan tersesat. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan. Pemahaman mengenai tujuan akan membantu untuk memperluas misi. Misi memperjelas tujuan organisasi. Dengan adanya tujuan yang sama maka suatu organisasi akan dapat berhasil dalam mencapai tujuannya. Demikian juga halnya dengan pendidikan tinggi akan dapat mencapai hasil dan kualitas yang baik, bila visi dan misi yang dibuat dapat dilaksanakan. Misi pendidikan tinggi yang menyatakan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan dan mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk itu, Perguruan tinggi perlu menentukan arah dan sasaran pengembangannya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan bersama penyelenggara pendidikan tinggi (pemerintah atau yayasan). Pengembangan suatu perguruan tinggi dapat menekankan keunggulan pendidikan (*teaching university*), penelitian (*research university*) atau keduanya.

Langkah signifikan yang diperlukan untuk menetapkan visi dan misi serta arah pengembangannya, adalah dengan cara meningkatkan

kemampuan mengidentifikasi potensi khas dan unggul yang dimiliki perguruan tinggi, Selanjutnya, kekhasan dan keunggulan tersebut dirumuskan dan dikembangkan dalam sasaran-sasaran yang realistis dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini masing-masing perguruan tinggi diharapkan dapat memilih dan menetapkan misi dan visi sebagai panduan pengembangan. Setiap perguruan tinggi diharapkan pula dapat memilih misinya secara kontekstual dengan ide-ide pengembangan yang mengandung kekhasan lokal, dengan tetap mengedepankan aspek relevansi terhadap kebutuhan pembangunan Nasional. Bila tujuan pendidikan tinggi telah jelas, maka pendidikan tinggi akan dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai misi dan visi yang ada. Jadi, reformasi pada visi dan misi pada pendidikan tinggi akan berpengaruh pada lulusannya agar mampu mengikuti perkembangan global sesuai dengan tuntutan pangsa pasar dan dunia kerja.

b. Kurikulum

Dalam menghadapi perkembangan global, pendidikan tinggi dapat mengadakan pembenahan dalam kurikulum. Kurikulum yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan program studi harus dapat menjaga keserasian antara program yang diselenggarakan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara meniadakan ketidakterpautan dan menghindarkan beban berlebihan proses pembelajaran, tetapi secara umum dapat mencirikan tugas khusus dan misi yang diembannya untuk setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum Pendidikan tinggi harus dapat disesuaikan dalam liberalisasi/globalisasi. Di era pasar bebas pada abad ke -21 ini, perguruan tinggi harus dapat mengantisipasi berbagai tuntutan, yaitu:

Pertama, persaingan tenaga kerja yang mengglobal, yang masuk bersama penanaman modal asing sebagai konsekuensi diberlakukannya perjanjian ASEAN-AFTA (mulai tahun 2002), WTO-GATT dan APEC (mulai tahun 2010). Untuk mengantisipasi hal ini, perguruan tinggi harus mampu menjamin hasil didiknya di berbagai bidang profesi untuk memperoleh sertifikat profesi sebagai syarat untuk memperoleh hak bekerja sesuai dengan kompetensi kepakaran yang dipelajarinya di perguruan tinggi (Tilaar, 2005)..

Kedua, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan peserta didik yang kompetensinya dinilai tidak hanya atas dasar penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga penguasaan sikap dan semangat kerja, kemampuan berkomunikasi interpersonal, kepemimpinan, kerja sama tim, analisis permasalahan dan sintesis pemecahan masalah, berdisiplin, teknologi informasi, pemanfaatan komputer, fleksibilitas kerja, mampu mengelola kekaburan masalah, dapat bekerja dalam berbagai budaya, pemahaman globalisasi, terlatih dalam etika kerja, serta menguasai bahasa asing sebagai bahasa utama kedua.

Ketiga, perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan program yang lebih humanis. Makna humanis dalam hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pendidikan, jaminan mutu pendidikan, dan kegayutan kebutuhan masyarakat, menjawab pertanyaan terhadap persamaan hak, pemenuhan perspektif internasional dan mantranya, biaya pendidikan yang sepadan (Balitbang, 2000).

Liberalisasi pendidikan tinggi adalah terjadinya pelayanan jasa pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh masyarakat global sebagai akibat dari ‘perdagangan’ jasa pendidikan tinggi yang diformalkan dari

organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO). Sebelum diformalkan oleh WTO, sebenarnya praktek globalisasi pendidikan tinggi sudah berlangsung di Indonesia. Ketika UGM Yogyakarta mempekerjakan dosen-dosen asing, Hal itu merupakan contoh dari praktek globalisasi pendidikan tinggi. Sekarang ini banyak Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang beroperasi di Indonesia, seperti *German-Swiss University Serpong* serta *Bond University of Wales* (dengan Universitas Esa Unggul) di Jakarta. Ini juga merupakan praktek dari globalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Pemerintah RI telah meratifikasi WTO melalui UU No 7/1994. Dengan demikian, sejak saat itu Indonesia telah menjadi salah satu anggota WTO yang memiliki kewajiban untuk menaati segala peraturan yang ada di dalamnya. Sampai saat ini WTO telah membagi belasan sektor jasa yang dapat diperdagangkan di tingkat dunia. Adapun satu dari beberapa sektor itu adalah jasa pendidikan, karena pendidikan dimasukkan dalam sektor jasa sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang dijual beli jasa pendidikan sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang dijual beli jasa pendidikan tinggi versi WTO dapat dijelaskan, yaitu :

Pertama, Model Cross Border Supply. Dalam hal ini suatu lembaga pendidikan pada suatu Negara menjual jasa pendidikan tanpa kehadiran fisik lembaga kepada konsumen yang berada di Negara lain.

Kedua, Model Consumption Abroad. Dalam hal ini lembaga pendidikan suatu Negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari Negara lain.

Ketiga, Model Movement of Natural Persons. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu Negara menjual jasa pendidikan ke konsumen Negara lain dengan cara mengirimkan personelnnya ke Negara konsumen.

Keempat, Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut. Hadirnya PTA dari negara manca negara untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah contoh yang sangat tepat untuk model perdagangan jasa pendidikan (Media Indonesia, 2006).

Dengan hadirnya PTA justru dapat dijadikan pemicu pengelola PTN dan PTS untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa tanpa meningkatkan mutu, lembaganya tidak akan 'dilirik' masyarakat. Sementara masyarakat yang memilih PTA pun tidak dapat dikatakan *nasionalismenya* rendah karena di era global sekarang ini pemilihan PTA, PTN dan PTS kurang relevan bila dikaitkan dengan nasionalisme. Akhir-akhir ini relatif banyak putra-putra terbaik kita 'terpaksa' harus bekerja menjadi dosen pada perguruan tinggi yang baik di luar negeri, di antaranya di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya dan bahkan ada pula yang di AS, Australia, Jerman, dan Jepang. Mereka itu tidak bisa dinyatakan memiliki sikap nasionalisme yang rendah.

c. Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

Dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran, perguruan tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih komprehensif sekaligus kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembaharuan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek (*student-centered learning*), dibandingkan sebagai obyek pendidikan. Konsep pendidikan juga perlu didesain untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan peningkatan *soft skills* serta *success skills* yang terintegrasi dalam materi pembelajaran, sehingga lulusan perguruan tinggi

akan mempunyai karakter percaya diri yang tinggi, memiliki kearifan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural bangsa, kemandirian serta jiwa kepemimpinan yang kuat (Purba, 2009).

Perguruan tinggi harus mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang *holistik*, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menekankan pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) secara harmonis. Kurikulum holistik yang dimaksud harus dirancang dengan pendekatan yang kontekstual sehingga mampu memunculkan *niche* tanpa mengurangi sasaran keilmuan atau keterampilan pokok pada bidang keilmuan masing-masing,

Mengingat adanya disparitas kualitas calon mahasiswa, ketidakseimbangan akses terhadap sumber-sumber informasi dan teknologi, serta tidak meratanya akses kerjasama pada perguruan tinggi unggulan, maka perlu diupayakan dilakukan diseminasi kemampuan suatu perguruan tinggi kepada perguruan tinggi lain. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kerjasama antar Perguruan Tinggi, pembentukan jaringan keilmuan (*networking*) atau penyelenggaraan *distance learning* yang berkualitas dan terencana. Dengan demikian, secara keseluruhan, perguruan tinggi perlu selalu berusaha meningkatkan mutu atmosfer akademik yang mendorong munculnya kreativitas dan inovasi serta terjadinya *team building* dan *team spirit*.

d. Manajemen Perguruan Tinggi

Di dalam pengelolaan perguruan tinggi harus ditujukan untuk mengantisipasi kehidupan yang penuh ketidakpastian, paradoksial, dan penuh persaingan, dengan upaya memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya staf pengajar. Perguruan tinggi sebagai sistem produksi dapat dinilai dengan tolok ukur, yaitu (a) mutu layanan, (b)

mutu hasil didik (produk), dan (c) mutu pengelolaan proses pembelajaran.

Mutu layanan jasa perguruan tinggi meliputi: tepat waktu pendidikan, jaminan keberhasilan pendidikan, iklim akademik yang mendukung, tidak adanya diskriminasi layanan jasa pendidikan, otonomi, kompetitif dalam kemudahan layanan dan kepercayaan penyelenggaraan. Mutu hasil didik (produk), meliputi: kompetensi pengetahuan dan sikap yang bersertifikasi, dan kompetitif secara nasional dan global, fleksibel dalam proses *long life education*, akreditasi, kemampuan membentuk jaringan kerjasama, Mutu pengelolaan proses pembelajaran, yang meliputi: efisiensi, akuntabel disertai evaluasi diri, program terencana dengan baik, satuan biaya kompetitif, berbagai fasilitas kemudahan studi, otonomi penyelenggaraan, dan fleksibel. Menurut Tampubolon (1999) bahwa Perguruan Tinggi yang bermutu adalah lembaga pendidikan tinggi yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan jasa-jasa kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan pada pelanggannya. Untuk itu, Perguruan Tinggi harus dapat melakukan manajemen modern yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, melalui Manajemen Mutu terpadu. Perguruan tinggi yang tidak dapat mempertahankan mutunya akan kalah dalam berbagai persaingan. Apa pun bentuk pengelolaan perguruan tinggi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas produktivitas yang berkelanjutan, karena tahap akhir kualitas kinerja perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas kinerja kolektif masing-masing anggota civitas akademika.

e. Staf Pengajar yang bermutu

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi adalah staf pengajar yang bermutu. Staf pengajar yang bermutu dapat diukur dengan lima faktor utama, yaitu kemampuan profesional,

upaya profesional, kesesuaian antara waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya, dan kesejahteraan yang memadai. Pengelolaan staf pengajar harus mempunyai sasaran utama, yaitu kenaikan kualitas produktivitasnya melalui peningkatan efisiensi kerja sebagai tenaga pendidik, peneliti dalam pengabdian kepada masyarakat atau lebih tepat dalam pelayanan jasa kepada masyarakat.

Selain itu, Tampubolon (1999) menyatakan staf pengajar haruslah menunjukkan keteladanan dalam perilaku sehari-hari, yang meliputi : 1) Perhatian yang besar terhadap tugas, 2) Disiplin diri yang menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan, menghargai dan tepat waktu, 3) Memiliki minat belajar yang tinggi, 4) Menghargai orang lain, 5) Memiliki sikap pelayanan yang baik, yang ditunjukkan melalui : (a) kepedulian akan persoalan mahasiswa, (b) penuh perhatian pada mahasiswa, (c) Ramah dan Sopan, (d) Rendah diri, meskipun memiliki kelebihan, (e) Sikap bersahabat pada setiap orang, (f) Sabar dalam memberikan pelayanan, (g) Sikap bijaksana dalam menciptakan suasana menang-menang, (h) Dekat dengan mahasiswa. Di samping kepemimpinan tersebut, staf pengajar haruslah memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk memperoleh sistem pendidikan tinggi yang produktif, staf pengajar harus berkebudayaan wirausaha dengan ciri: (a) percaya diri, (b) berorientasi pada tugas dan hasil, (c) berani mengambil resiko demi kemajuan, (d) berjiwa kepemimpinan yang terbuka dan mudah bergaul atau bekerjasama, (e) berpikir ke arah yang asli, dan (f) orientasi ke masa depan.

Pengembangan budaya kewirausahaan para staf pengajar, dilakukan dengan melalui jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara keseluruhan bernuansa kewirausahaan.

Sumberdaya staf pengajar yang berjiwa kewirausahaan akan menjaga profesionalitas dalam karirnya sesuai dengan kompetensi ilmunya. Secara terbuka akan berani mengatakan dan membela kebenaran ilmiah, dengan tetap berada pada posisinya sebagai seorang dosen. Produktivitas dan mutu karya tulis seorang staf pengajar mencerminkan mutunya sebagai staf pengajar yang mampu menjalankan fungsi keilmuan, bukan sekadar mengajar. Kegiatan keilmuan yang dimaksud meliputi salah satu atau semua dari empat kegiatan ini: (a) penelitian, (b) pengkajian, (c) pengkomunikasian hasil-hasil penelitian dan pengkajian, dan (d) aplikasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian dalam praktek. Penyelenggaraan pendidikan tinggi diharapkan mampu menampung politisasi pendidikan, kebutuhan belajar sepanjang hayat, internasionalisasi pendidikan tinggi dalam makna *reconvergent phase of education*.

Penutup

Dalam menghadapi era global, Perguruan Tinggi akan menghadapi tantangan yang berat. Akibat percepatan arus perubahan sosial yang drastis, akhirnya secara sadar atau tidak, telah memaksa berbagai penjual jasa, termasuk perguruan tinggi untuk lebih adaptif terhadap perubahan tersebut. Untuk itu, Perguruan Tinggi haruslah melakukan reformasi dalam mengantisipasi arus perubahan yang demikian cepatnya. Reformasi pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui reformasi, di antaranya: visi dan misi pendidikan tinggi, pembenahan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, sistem manajemen perguruan tinggi yang adaptif terhadap perubahan, dan tenaga pendidik/ Staf pengajar.

Dalam melakukan reformasi dalam bidang proses pembelajaran harus dilakukan secara terorganisir dengan memperhatikan atau

menekankan pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) secara harmonis. Selain itu, dalam kurikulum perlu diberikan kemampuan dalam bidang wirausaha agar lulusan perguruan tinggi mampu memanfaatkan ilmunya untuk membuka lapangan usaha sendiri, setelah mereka menamatkan studinya kelak. Di samping itu, dalam strategi pembelajaran perlu ditingkatkan pemberian pengetahuan *Soft skill* dan *success skill* yang terintegrasi dalam materi pembelajaran, agar lulusannya memiliki kemandirian, rasa percaya diri dan kepemimpinan yang kuat menghadapi berbagai tantangan/ permasalahan.

DAFTAR BACAAN

- Balitbang. *Jurnal Pendidikan Tinggi*. 2000. Jakarta : Depdiknas
- Efendi, Sofyan. 2002. "Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi : Resep Profesor Nicholas Barr". *Makalah*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Media Indonesia, *Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, 23 Agustus 2005
- Purba, Sukarman, 2004. "Menuju Perguruan Tinggi Masa Mendatang : Sebagai Bahan Hukum Milik Negara", *Makalah*. Jakarta : PPS UNJ.
- _____. 2009. "Peningkatan Mutu Pendidikan dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan serta Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi". *Artikel*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan
- Scott, Peter (ed). 2000. *Higher Education Reformed*. London: Falmer Press
- Tampubolon, Daulat P. 1999. "Perguruan Tinggi Bermutu". *Makalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: Buku Kompas.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1998. *Jaringan Pendidikan Tinggi Menyongsong Era Globalisasi*, *Artikel*, Jakarta : Universitas Indonesia.